

## VISI DAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

### BAB IV

Perumusan visi dan misi jangka menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan salah satu tahap penting dalam penyusunan dokumen Renstra SKPD. Visi dan misi tersebut akan menjadi pondasi awal kelembagaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terkait bidang masing-masing serta menjadi target-target kinerja untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah. Visi kelembagaan akan menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal lembaga/instansi di masa depan (*clarity of direction*) sebagai dukungan sistem birokrasi maupun pelayanan publik terhadap keberhasilan pembangunan daerah. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai target masa depan yang diharapkan akan mengatasi berbagai hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi agar tujuan pembangunan dapat terlaksana dan berhasil. Misi yang harus diemban merupakan dasar dari sasaran pembangunan oleh pemerintah daerah sekaligus mengawali penyusunan program/kegiatan dalam perencanaan kinerja kelembagaan.

#### 4.1. Visi dan Misi BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur

Sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 050.14/...../Bapp/2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2013-2018, bahwa Visi dan Misi setiap SKPD di lingkup Provinsi Kalimantan Timur berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA dalam Peraturan Gubernur Nomor 46 tahun 2008, maka Visi BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur yaitu:

**“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas untuk  
Kesejahteraan Masyarakat Kaltim Tahun 2018”**

Visi BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur mengandung makna bahwa BAPPEDA mengemban tugas untuk mengawal setiap langkah pelaksanaan program pembangunan yang menjadi Visi Gubernur Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan formulasi hasil analisis terhadap potensi daerah, permasalahan mendasar, dan isu-isu strategis yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur. BAPPEDA selaku koordinator perencanaan pembangunan harus dapat menyelenggarakan perencanaan pembangunan yang efektif demi pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018.

Dalam penjabarannya, Visi BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Perencanaan Pembangunan**, adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pembangunan dalam hal ini adalah pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan usaha bersama seluruh komponen masyarakat dan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan daerah yakni kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan.

**Berkualitas**, berarti memiliki taraf yang tinggi pada pembangunan daerah dimana hal tersebut berasal dari proses perencanaan yang baik dan komprehensif. Sebuah perencanaan yang berkualitas merupakan titik tolak keberhasilan pembangunan daerah menuju masa depan lebih baik dengan program-program nyata yang efektif pada pencapaian sasaran pembangunan. Efektif dalam hal ini mengandung pengertian “ketepatan penggunaan dan hasil guna”, sehingga efektif merupakan faktor pokok dalam mencapai tujuan atau sasaran pembangunan yang berkualitas.

Suatu penyelenggaraan perencanaan pembangunan harus mampu mengantarkan dan mendekatkan setiap tahapannya pada pencapaian tujuan pembangunan daerah yakni terwujudnya “Kaltim yang sejahtera yang merata dan berkeadilan berbasis agroindustri dan energi ramah lingkungan”.

Pada tahapan selanjutnya, visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi-misi yang akan menjadi tanggung jawab BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur selama periode perencanaan pembangunan. Pernyataan misi-misi yang digaungkan oleh BAPPEDA dimaksudkan agar seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peranan instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas ke pemerintahannya. Misi BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut::

## **1. Menyusun Perencanaan yang Berkualitas dan Terintegrasi dengan Penganggaran Pembangunan Daerah**

Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya peningkatan kualitas perencanaan partisipatif pada perencanaan pembangunan daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Dalam proses pembangunan daerah, secara normatif BAPPEDA mempunyai akses yang sangat kuat terhadap penentu kebijakan di lingkungan pemerintah daerah. BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur memiliki dominasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (struktural dan fungsional) karena berperan secara aktif sebagai perencana, pengoordinasi, sekaligus sebagai pengendali pelaksanaan pembangunan daerah.

Sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah, SDM perencana pembangunan menjadi sangat penting karena menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan pembangunan. Kualitas perencanaan sangat tergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana pembangunan. Peningkatan profesionalisme merupakan upaya peningkatan kinerja perencana pembangunan terkait dengan kesetiaan, logika, dan etika. Diharapkan, dengan meningkatnya kualitas perencana pembangunan, maka akan meningkat pula derajat perencanaan program pembangunan daerah.

Perencanaan dan Penganggaran merupakan dua elemen penting yang saling berkaitan dalam siklus Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD). Kegiatan perencanaan dan penganggaran merupakan awal dari siklus pengelolaan keuangan daerah yang memiliki makna krusial dalam menentukan arah pengelolaan keuangan daerah dalam perannya sebagai pendukung pembangunan daerah.

Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sementara itu, penganggaran dapat diartikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Oleh karena itu, keselarasan dalam perencanaan dan penganggaran harus selalu diperhatikan mengingat setiap program-program dalam perencanaan pembangunan membutuhkan pendanaan, namun disisi lain pendanaan yang ada harus digunakan se-efektif mungkin dalam pelaksanaan program pembangunan. Sinkronisasi dua elemen ini menjadi salah satu fokus utama dalam pembentukan dokumen perencanaan sehingga perlu ada nya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam rangka menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran

## **2. Melakukan Koordinasi yang Efektif, Efisien berbasis Data statistik dan Data spasial**

Konsistensi dan sinkronisasi secara menyeluruh pada setiap lini perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah merupakan salah satu tugas utama dari BAPPEDA. Oleh karena itu, BAPPEDA dituntut untuk mampu mengoordinasikan proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan dan menyeluruh. Dalam misi kedua ini mengandung poin penting dalam mendukung keberhasilan misi pertama dimana dalam perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan pembangunan daerah yang berkualitas harus didukung dengan koordinasi yang efektif dan efisien dengan berbasis data statistik dan data spasial. Data Statistik dan Data spasial ini digunakan sebagai referensi data dan menjadi media yang penting dalam perencanaan dan pembangunan serta pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan pada cakupan wilayah continental, nasional, regional maupun pada wilayah lokal daerah. Dengan koordinasi yang berbasis data spasial diharapkan koordinasi yang dihasilkan akan memberi dampak yang signifikan dalam pengembangan dan pembangunan daerah. Koordinasi yang efektif dan efisien berbasis data spasial ini akan mampu meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga dapat meminimalisir kesalahan, *miss* komunikasi, hingga inkonsistensi antara perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan daerah.

## **3. Meningkatkan Pemantauan dan Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah**

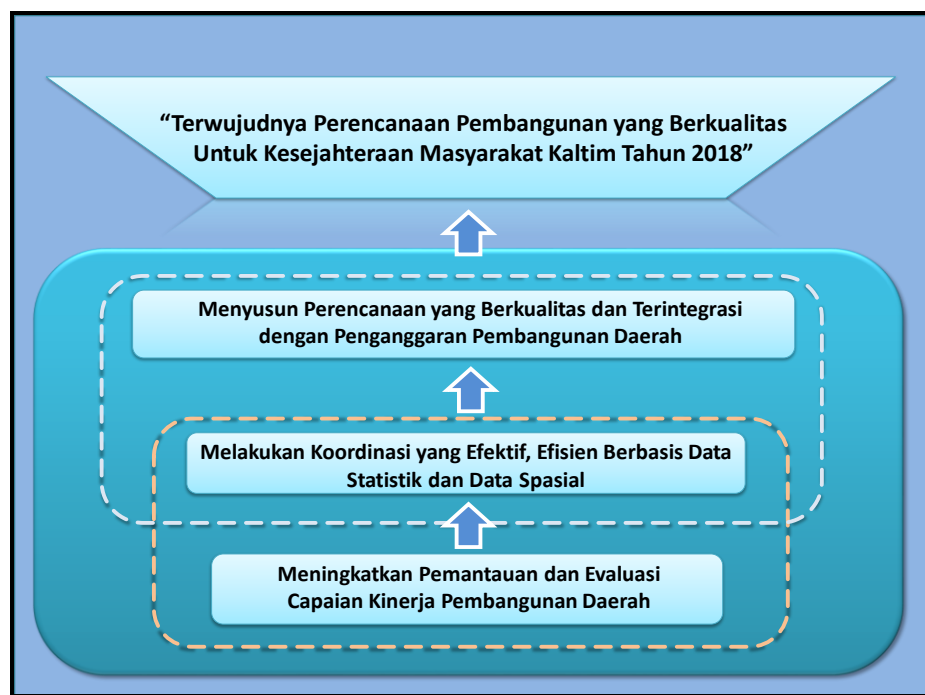
BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur selain bertugas sebagai pelopor perencanaan pembangunan daerah, juga harus melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja setiap target-target program pembangunan yang telah direncanakan. Pelaksanaan pembangunan daerah oleh setiap satuan kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur akan dimonitoring dan dievaluasi guna melakukan perbaikan-perbaikan sehingga hasil-hasil pembangunan akan meningkat kualitasnya dari waktu ke waktu.

Peningkatan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah akan memperlihatkan bagaimana kinerja dan hasil capaian kinerja sebuah program/kegiatan dalam mencapai targetnya. Pemantauan selama pelaksanaan kegiatan akan menuntun dalam pelaksanaan program/kegiatan agar berada pada koridor/jalur batas sesuai perencanaan. Sedangkan evaluasi kinerja akan memberikan banyak masukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan program/kegiatan yang telah dilaksanakan. Kedua hal tersebut akan menjadi tolok ukur apakah program/kegiatan harus dilanjutkan, diperbaiki,

atau bahkan dilakukan revisi yang lebih efektif untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Hubungan dari ketiga misi tersebut dalam mencapai visi BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 4.1.**  
**Hubungan Visi dan Misi BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur**



#### 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur

Dalam menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur, maka yang perlu dipertimbangkan adalah pencapaian visi dan misi BAPPEDA. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dan potensi dalam organisasi. Dalam upaya tersebut, seluruh sumber daya dan potensi dalam organisasi harus mempunyai *core-competencies* untuk mencapai tujuan dan sasaran kelembagaan.

**Tujuan** merupakan salah satu komponen dalam perencanaan strategis sehingga perlu dirumuskan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh BAPPEDA selama kurun waktu

lima tahun ke depan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, tujuan juga merupakan *effort* dalam mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi seperti yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2013-2018. Tujuan jangka menengah ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang berdasarkan visi dan misi yang terbentuk. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih pada masing-masing misi.

Adapun tujuan Renstra BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 dapat dijabarkan pada rincian sebagai berikut:

#### **1. Meningkatkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah**

Dalam upaya mewujudkan misi pertama yaitu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur harus meningkatkan efektifitas pada setiap progress perencanaan pembangunan sehingga kualitas perencanaan tetap terjaga. Perencanaan yang berkualitas merupakan dasar yang harus diperkokoh agar sistem perencanaan pembangunan menjadi tepat guna dan tepat sasaran.

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur, pembangunan yang dilakukan perlu direncanakan dengan baik sehingga penyelenggaraan pembangunan dapat menghasilkan nilai tambah positif bagi masyarakat. Pembangunan daerah yang berlandaskan perencanaan pun akan memiliki kelebihan jika dilaksanakan secara maksimal dengan sistem pengendalian serta evaluasi yang optimal.

Sebuah perencanaan akan menjadi sia-sia jika dalam pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah tidak didukung adanya pendanaan yang efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa perencanaan pembangunan daerah memiliki keterbatasan ruang gerak jika pendanaan pemerintah tidak optimal dalam mendukung pencapaian pembangunan.

Tujuan dalam peningkatan konsistensi 2 (dua) elemen ini dimaksudkan agar perencanaan dan penganggaran dapat terintegrasi dalam lingkup penganggaran yang efektif terhadap program/kegiatan yang direncanakan akan berdampak pada akselesari pembangunan daerah. Selain itu, maksud dari pembangunan yang terintegrasi adalah terciptanya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta program pembangunan antara daerah dan pusat. Perencanaan dan penganggaran adalah dua

kata yang tidak bisa dipisahkan karena hubungan keduanya saling berkorelasi satu sama lain sehingga konsistensi perencanaan dan penganggaran perlu diwujudkan dengan konsistensi program/kegiatan antara RKPD dan APBD.

## **2. Meningkatkan Kualitas Data/Informasi Spasial Perencanaan Pembangunan Daerah serta Mengoptimalkan Fungsi Koordinasi**

Dalam tahapan perencanaan merupakan suatu rangkaian terpadu yang disusun dengan mempertimbangkan segala hal teknis maupun non teknis hingga kuantitatif maupun kualitatif. Dari berbagai pertimbangan tersebut akan dilakukan analisis dengan berdasarkan fakta yang diambil dari data atau informasi kondisi pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur. Data atau informasi akan menjadi acuan awal bagi setiap analisis yang berujung pada pengambilan keputusan oleh BAPPEDA berupa perencanaan pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, data atau informasi harus memiliki beberapa persyaratan antara lain valid, obyektif, *up to date*, dengan memiliki metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan, hingga sesuai dengan keadaan di lapangan. Pentingnya kualitas data maupun informasi ini akan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan baik dari segi konten hingga target-target yang akan dicapai.

Fungsi koordinasi merupakan sebuah fungsi dimana BAPPEDA harus melakukan rekonsiliasi, sosialisasi, diskusi, hingga tukar pikiran baik dengan internal maupun eksternal.

Dalam koordinasi internal, harus diciptakan suatu lingkungan kerja yang kondusif antar bidang-bagian BAPPEDA. Perencanaan pembangunan BAPPEDA harus menjadi tanggung jawab setiap elemen aparatur BAPPEDA baik di bidang teknis maupun non teknis. Oleh karena itu, harus ada mata rantai penghubung yang akan menjadi “benang merah” dalam menyusun rangkaian perencanaan pembangunan dari berbagai “gerbong-gerbong” bidang di BAPPEDA agar tercipta sebuah harmonisasi perencanaan pembangunan daerah untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Sedangkan pada koordinasi eksternal, BAPPEDA harus mampu melakukan koordinasi dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan pembangunan, monitoring, hingga evaluasi program/kegiatan. Diharapkan dengan adanya koordinasi eksternal, tidak akan ada *miss*

komunikasi antara perencana dan pelaksana program kegiatan baik dalam hal perencanaan, penganggaran, maupun pelaksanaan pembangunan daerah.

### 3. Terkendalinya Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan Rencana Strategis BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur yang ketiga merupakan gerbong akhir dari rangkaian misi pertama dan kedua dimana pada tujuan ini BAPPEDA ingin mengendalikan sasaran pembangunan yang telah dicapai sehingga tidak terjadi penurunan dalam pembangunan daerah.

Untuk mencapai visi dan misi BAPPEDA, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai pembangunan daerah seutuhnya perlu dilaksanakan koordinasi pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagai dukungan pada capaian sasaran pembangunan nasional. Oleh karena itu, pengendalian terhadap capaian sasaran pembangunan daerah sangat penting untuk menjaga stabilitas pembangunan nasional. Namun yang perlu diperhatikan, pengendalian sasaran pembangunan tidak hanya ditujukan pada capaian kinerja yang telah dilaksanakan, akan tetapi pengendalian terhadap target-target ke depan juga harus diutamakan. Hal ini penting dilakukan karena pencapaian pembangunan daerah harus sesuai dengan koridor perencanaan yang disepakati sehingga tidak negatif atau *overloop* dalam pelaksanaannya.

**Sasaran** merupakan kondisi yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam jangka waktu tahunan hingga periode lima tahun mendatang. Dari ketiga tujuan Renstra BAPPEDA, dapat diturunkan menjadi sasaran-sasaran perencanaan pembangunan yang efektif dan spesifik serta memiliki indikator yang dapat diukur sebagai bahan evaluasi perencanaan pembangunan selanjutnya. Sasaran yang ingin dicapai BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur periode 2013-2018 sebagai berikut:

1. Tujuan pertama, “Meningkatkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah” dapat dicapai dengan sasaran:
  - a. Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antar fungsi perencanaan dan penganggaran, dengan indikator sebagai berikut:
    - Persentase efektivitas perencanaan pembangunan daerah;



- Persentase integrasi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur pada regional; dan
  - Persentase kesesuaian DPA dengan RKPD.
2. Tujuan kedua, “Meningkatkan Kualitas Data/Informasi Perencanaan Spasial Pembangunan Daerah serta Mengoptimalkan Fungsi Koordinasi” dapat dicapai dengan sasaran:
- a. Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi serta Fungsi Peran Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan indikator sebagai berikut;
- Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan; dan
  - Persentase koordinasi perencanaan pembangunan.
3. Tujuan ketiga, “Terkendalinya Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah” dapat dicapai dengan sasaran:
- a. Tercapainya Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, dengan indikator sebagai berikut:
- Persentase Pencapaian RKPD terhadap Sasaran RPJMD.

**Tabel 4.1.**  
**Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur**

VISI : TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALTIM TAHUN 2018										
MISI 1: Menyusun Perencanaan yang berkualitas dan terintegrasi dengan Penganggaran Pembangunan Daerah										
No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -					Kondisi Akhir
					2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Meningkatkan konsistensi Perencanaan dan penganggaran Pembangunan daerah	Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antar fungsi perencanaan dan penganggaran	Persentase efektivitas perencanaan pembangunan daerah		90	93	95	97	99	99
			Persentase integrasi pembangunan Kaltim pada regional Kalimantan		80	85	87	90	95	95
			Persentase kesesuaian DPA dengan RKPD		70	75	80	85	95	95
MISI 2: Melakukan koordinasi yang efektif										
2.	Meningkatkan Kualitas Data /Informasi Spasial Perencanaan Pembangunan Daerah serta Mengoptimalkan Fungsi Koordinasi	Meningkatnya Kualitas Data/informasi dan Spasial serta Fungsi Peran Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan		70	75	85	95	100	100
			Persentase koordinasi perencanaan pembangunan		64	77	83	89	95	95
MISI 3: Meningkatkan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah										
3.	Terkendalinya Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah	Tercapainya Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur	Persentase Pencapaian RKPD terhadap Sasaran RPJMD		60	70	80	90	95	95

#### 4.3. Strategi dan Kebijakan BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur diperlukan strategi dan kebijakan yang pro-pembangunan daerah sehingga tetap berjalan sesuai koridor perencanaan pembangunan. Penyusunan strategi dan kebijakan pada Renstra BAPPEDA akan melibatkan keseluruhan bidang-bagian karena dalam pelaksanaan program/kegiatan perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi antar bidang maupun bidang-bagian. Hal tersebut dipandang perlu, karena koordinasi dan sinkronisasi akan sangat mempengaruhi capaian kinerja BAPPEDA secara keseluruhan dalam meraih visi yang diemban.

**Strategi** adalah rangkaian cara atau langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif dalam rangka meningkatkan persentase keberhasilan pencapaian pembangunan daerah. Strategi merupakan kesatuan rencana yang umum, luas, dan terintegrasi yang menghubungkan antara sumber daya, potensi, program kerja, dan permasalahan yang menghadang dalam rangka mewujudkan cita-cita pemerintah daerah dalam menyejahterakan masyarakatnya. Strategis harus bersifat *incremental* (terus meningkat), taktis terhadap ruang lingkup yang terbatas, dan periode waktu dalam pencapaian tujuan. Sedangkan rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dengan tindak lanjut berupa penyusunan serangkaian kebijakan yang tepat.

Dalam pencapaian visi dan misinya, BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur memiliki strategi-strategi yang dihasilkan dari analisis maupun kajian baik pada evaluasi pembangunan daerah periode sebelumnya, isu-isu dan permasalahan yang sedang maupun akan dihadapi, hingga dampak positif maupun negatif dari program/kegiatan pendukung pembangunan daerah. Strategi untuk mencapai visi dan misi BAPPEDA dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths-Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan dalam mencapai cita-cita pembangunan. Kebijakan merupakan suatu bentuk, hasil, produk, atau fungsi dari suatu kesepahaman melalui analisis panjang terkait rumusan, rincian, penjelasan, maupun penilaian atas suatu permasalahan pembangunan daerah yang dikelola sedemikian rupa sehingga menghasilkan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan program/kegiatan. Kebijakan yang akan diambil memberikan arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program/kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Kebijakan dapat

bersifat internal yang berarti kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yang memiliki fokus kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal. Faktor-faktor tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, threats*), dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. **Kekuatan (*Strengths*)**

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor internal, teridentifikasi beberapa kekuatan yang harus dimanfaatkan secara baik dalam mencapai tujuan dan sasaran seperti:

- a. Struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008;
- b. Ketersediaan jumlah personil dan kapasitas kemampuan yang cukup memadai;
- c. Fasilitas maupun sarana prasarana yang dimiliki;
- d. Kapasitas dalam perencanaan dan kajian strategik pembangunan yang telah dihasilkan dan dimanfaatkan;
- e. Kerjasama yang solid dengan *stakeholders* yang sudah semakin meningkat; dan
- f. Tersedianya *mapping* sebagai fasilitas perencanaan tata ruang dan perencanaan lainnya.

#### 2. **Kelemahan (*Weaknesses*)**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur hingga saat ini masih menjumpai berbagai kelemahan internal yang harus diminimalisir agar tidak membebani pencapaian pembangunan. Kelemahan internal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Distribusi SDM belum sesuai kompetensi pada masing-masing bidang;
- b. Belum terisinya jabatan fungsional seperti yang diamanatkan pada Peraturan Gubernur Nomor 46 tahun 2008;
- c. Belum dimanfaatkannya secara optimal hasil-hasil kajian strategis pembangunan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan;

- d. Belum optimal ketersediaan data dan informasi pembangunan yang kontinyu, lengkap, akurat, dan *update*;
- e. Belum maksimalnya pelayanan prima oleh BAPPEDA kepada *stakeholders* dan masyarakat; dan
- f. Belum terlihatnya peran TAPD dalam membantu peningkatan porsi BL.

### 3. Peluang (*Opportunities*)

Hasil analisis terhadap faktor eksternal menemukan berbagai peluang yang perlu dimanfaatkan dalam strategi dan kebijakan BAPPEDA, antara lain:

- a. Tingginya kepercayaan Gubernur terhadap keberadaan BAPPEDA tidak saja dalam merencanakan tetapi juga mengkoordinasikan pembangunan daerah;
- b. Pesatnya perkembangan teknologi informasi baik secara regional maupun global;
- c. Tercapainya integrasi sistem informasi pembangunan dan keuangan daerah;
- d. Tersedianya sarana dan prasarana teknologi yang memadai;
- e. Adanya kerjasama regional se-Kalimantan yang sudah terjalin untuk keterpaduan perencanaan pembangunan tingkat nasional; dan
- f. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

### 4. Ancaman (*Threats*)

Di samping itu, berbagai ancaman eksternal juga perlu diantisipasi dalam penyusunan strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan ke depan, antara lain:

- a. Belum efektifnya pelaksanaan sistem dan mekanisme koordinasi perencanaan dan sistem penganggaran;
- b. Belum efektifnya koordinasi antara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan;
- c. Belum optimalnya sistem pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- d. Semakin besarnya tuntutan perencanaan yang berkualitas;

- e. Kekayaan potensi sumber daya alam (terutama *renewable*) di Provinsi Kalimantan Timur yang belum dikelola dengan baik;
- f. Adanya ego SKPD dan pemangku kebijakan yang menyebabkan rendahnya konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
- g. Semakin besarnya tuntutan sistem penganggaran yang efektif, efisien, partisipatif, dan transparan berbasis teknologi.

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang dihadapi, maka strategi BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian beberapa sasaran pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Strategi dan Sasaran Perencanaan Pembangunan BAPPEDA**  
**Provinsi Kalimantan Timur**

No.	Strategi	Sasaran
(1)	(2)	(3)
1.	Strategi 1: Membangun manajemen kinerja dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencanaan pembangunan	Tercapainya Integrasi dan Sinkronisasi antar Fungsi Perencanaan dan Penganggaran
2.	Strategi 2: Optimalisasi peran BAPPEDA di TAPD dalam mengkonsistenkan perencanaan dan penganggaran	
3.	Strategi 3: Penyediaan dan pemutakhiran data dan informasi bahan perencanaan pembangunan dan optimalisasi penggunaan teknologi informasi	Meningkatnya Kualitas Data /Informasi dan Spasial serta Fungsi Peran Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
4.	Strategi 4: Optimalisasi peran BAPPEDA dalam melakukan koordinasi perencanaan, penganggaran, dan pengendalian di SKPD dan kabupaten/kota	
5.	Strategi 5: Mengintegrasikan sistem perencanaan dan kerjasama pembangunan tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota	Tercapainya Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai strategi dan sasaran perencanaan pembangunan BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur.

**1) Strategi 1: Membangun manajemen kinerja dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencanaan pembangunan**

Upaya meningkatkan efektifitas perencanaan dapat dilakukan dengan cara peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencanaan pembangunan. Untuk mewujudkan tujuan pertama yaitu meningkatkan efektivitas perencanaan, selain dilakukan dengan cara peningkatan kapasitas kelembagaan sistem perencanaan pembangunan (strategi kedua), juga dilakukan dengan cara peningkatan kapasitas aparatur BAPPEDA di bidang perencanaan pembangunan. Peningkatan kapasitas aparatur perencanaan pembangunan menjadi faktor penting dalam penyusunan perencanaan karena kualitas aparatur di bidang perencanaan akan menentukan kualitas dokumen perencanaan yang dihasilkan. Oleh karena itu, strategi peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencanaan pembangunan digunakan untuk mencapai sasaran “Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antara fungsi perencanaan dan penganggaran”.

**2) Strategi 2: Optimalisasi peran BAPPEDA di TAPD dalam mengkonsistenkan perencanaan dan penganggaran**

Optimalisasi peran BAPPEDA di TAPD sangat penting untuk mencapai misi dalam pengintegrasian perencanaan dan penganggaran. Maksud dari integrasi perencanaan dan penganggaran adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan BAPPEDA untuk mengkonsistenkan antara perencanaan dan penganggaran sehingga dalam pelaksanaan pembangunan daerah tidak terkendala masalah pendanaan. Strategi optimalisasi peran BAPPEDA di TAPD dalam mengkonsistenkan perencanaan dan penganggaran digunakan untuk mencapai sasaran “Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antara fungsi perencanaan dan penganggaran”.

**3) Strategi 3: Penyediaan dan pemutakhiran data dan informasi bahan perencanaan pembangunan dan optimalisasi penggunaan teknologi informasi**

Optimalisasi penggunaan teknologi dan sistem informasi harus dilakukan untuk memperoleh dokumen perencanaan yang berkualitas dan terukur sehingga dapat dijadikan indikator dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan. Indikator-indikator yang diolah dari data dan informasi kemudian dianalisis dan dikaji lebih lanjut merupakan landasan perencanaan sekaligus target kuantitatif pembangunan daerah yang ingin dicapai. Strategi penyediaan dan pemutakhiran data dan informasi sebagai bahan perencanaan pembangunan dan optimalisasi penggunaan

teknologi informasi digunakan untuk mencapai sasaran "Meningkatnya kualitas data dan informasi serta fungsi peran koordinasi perencanaan pembangunan daerah".

**4) Strategi 4: Optimalisasi peran BAPPEDA dalam melakukan koordinasi perencanaan, penganggaran, dan pengendalian di SKPD dan kabupaten/kota**

Sebagai institusi yang memberikan kontribusi berupa pondasi dalam pembangunan daerah, BAPPEDA memiliki tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah dalam hal ini Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, BAPPEDA harus melakukan koordinasi baik secara internal maupun eksternal. Koordinasi tersebut dilakukan untuk melaksanakan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program/kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD maupun pemerintah kabupaten/kota. Diharapkan dengan adanya koordinasi ini, terjadi hubungan timbal balik yang positif antara BAPPEDA dengan pihak kedua sehingga harmonisasi kinerja akan tercapai dan pencapaian sasaran "Meningkatnya kualitas data dan informasi serta fungsi peran koordinasi perencanaan pembangunan daerah" dapat terwujud.

**5) Strategi 5: Mengintegrasikan sistem perencanaan dan kerjasama pembangunan tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota**

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif perlu dilakukan upaya-upaya konkrit terutama dalam hal pengintegrasian sistem perencanaan pembangunan dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Integrasi dalam hal ini merupakan keselarasan rangkaian dari setiap perencanaan baik regional maupun nasional yang merupakan satu kesatuan Negara Republik Indonesia sehingga pada prinsipnya memiliki tujuan yang sama. Strategi mengintegrasikan sistem perencanaan dan kerjasama pembangunan tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota digunakan untuk mencapai sasaran "Tercapainya sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur".

Kebijakan merupakan arah atau tindakan yang diambil oleh BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur dengan berlandaskan analisa dan kajian pembangunan untuk mencapai tujuan. Kebijakan terkait perencanaan pembangunan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Strategi 1: Membangun Manajemen kinerja dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencanaan pembangunan, dilakukan dengan kebijakan sebagai berikut:



- a. Penyediaan pedoman teknis yang komprehensif dalam penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah;
  - b. Pengintegrasian arsitektur kinerja pembangunan nasional, daerah, SKPD, dan kabupaten/kota;
  - c. Pengintegrasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
  - d. Pengembangan dan integrasi penanganan permasalahan-permasalahan pembangunan; dan
  - e. Penjaringan aspirasi dan partisipatif stakeholder skala nasional dan regional.
2. Strategi 2: Optimalisasi peran BAPPEDA di TAPD dalam mengkonsistenkan perencanaan dan penganggaran, dilakukan dengan kebijakan sebagai berikut:
- a. Peningkatan profesionalisme TAPD dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran pembangunan; dan
  - b. Pengintegrasian sistem informasi pembangunan dan keuangan daerah.
3. Strategi 3: Penyediaan dan pemutakhiran data dan informasi bahan perencanaan pembangunan dan optimalisasi penggunaan teknologi informasi, dilakukan dengan kebijakan sebagai berikut:
- a. Penyediaan data dan informasi pembangunan yang lebih akurat dan tepat waktu; dan
  - b. Pengintegrasian sistem informasi pembangunan antar bidang di BAPPEDA, antara BAPPEDA dan SKPD, serta antara provinsi dan kabupaten/kota
4. Strategi 4: Optimalisasi peran BAPPEDA dalam melakukan koordinasi perencanaan, penganggaran, dan pengendalian di SKPD dan kabupaten/kota, dilakukan dengan kebijakan sebagai berikut:
- a. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan;
  - b. Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah dan SKPD (tahunan); dan
  - c. Peningkatan kualitas pengendalian kinerja pembangunan tahunan.

5. Strategi 5: Mengintegrasikan sistem perencanaan dan kerjasama pembangunan tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, dilakukan dengan kebijakan sebagai berikut:
  - a. Pengevaluasian keselarasan implementasi peraturan perundangan perencanaan pembangunan daerah di tingkat pusat hingga tingkat provinsi/kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur;
  - b. Perbaikan pengelolaan kinerja pembangunan (*impact, outcome, dan output*);
  - c. Perbaikan integrasi berbagai laporan dan evaluasi kinerja; dan
  - d. Peningkatan kualitas pengendalian kinerja pembangunan daerah.

**Tabel 4.3**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra BAPPEDA**  
**Provinsi Kalimantan Timur**

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	KEBIJAKAN	
(1)		(2)		(3)	(4)	
1.	Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	1.	Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antara fungsi perencanaan dan penganggaran	<b>S1: Membangun manajemen kinerja dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencanaan pembangunan</b>	1.	Penyediaan pedoman teknis yang komprehensif dalam penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah
					2.	Pengintegrasian arsitektur kinerja pembangunan nasional, daerah, SKPD dan kabupaten/kota
					3.	Pengintegrasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota
					4.	Pengembangan dan integrasi penanganan permasalahan - permasalahan pembangunan
					5.	Penjaringan aspirasi dan partisipatif <i>stakeholders</i> skala nasional dan regional
				<b>S2: Optimalisasi peran BAPPEDA di TAPD dalam mengkonsistenkan perencanaan dan penganggaran</b>	1.	Peningkatan profesionalisme TAPD dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran pembangunan
					2.	Pengintegrasian sistem informasi pembangunan dan keuangan daerah
2.	Meningkatkan kualitas data/informasi Spasial perencanaan	2.	Meningkatnya kualitas data/informasi	<b>S3: Penyediaan dan pemutakhiran data dan informasi bahan</b>	1.	Penyediaan data dan informasi pembangunan yang lebih akurat dan tepat waktu

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	KEBIJAKAN	
(1)		(2)		(3)	(4)	
	pembangunan daerah serta mengoptimalkan fungsi koordinasi		dan Spasial serta fungsi peran koordinasi perencanaan pembangunan daerah	<b>perencanaan pembangunan dan optimalisasi penggunaan teknologi informasi</b>	2.	Pengintegrasian sistem informasi pembangunan antar bidang di BAPPEDA, antara BAPPEDA dan SKPD, serta antara provinsi dan kabupaten/kota
				<b>S4: Optimalisasi peran BAPPEDA dalam melakukan koordinasi perencanaan, penganggaran, dan pengendalian di SKPD dan kabupaten/kota</b>	1.	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan
					2.	Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah dan SKPD (tahunan)
					3.	Peningkatan kualitas pengendalian kinerja pembangunan tahunan
3.	Terkendalnya pencapaian sasaran pembangunan daerah	3.	Tercapainya sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur	<b>S5: Mengintegrasikan sistem perencanaan dan kerjasama pembangunan tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota</b>	1.	Pengevaluasian keselarasan implementasi peraturan perundangan perencanaan pembangunan daerah di tingkat pusat hingga tingkat provinsi/kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur
					2.	Perbaikan pengelolaan kinerja pembangunan ( <i>impact, outcome, dan output</i> )
					3.	Perbaikan integrasi berbagai laporan dan evaluasi kinerja
					4.	Peningkatan kualitas pengendalian kinerja pembangunan daerah